

EVALUASI PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH SESUAI PSAP 71 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DI KANTOR BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

EVALUATION OF THE PRESENTATION OF REGIONAL FINANCIAL STATEMENTS IN ACCORDANCE WITH PSAP 71 OF GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARDS AT THE OFFICE OF THE REGIONAL REVENUE AGENCY OF NORTH SULAWESI PROVINCE

Oleh:

Fitria Lestari¹

Meily Kalalo²

¹²³Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado

E-mail:

¹ lfitria03@gmail.com

² yokebetsymeily@unrat.ac.id

Abstrak: Laporan Keuangan pemerintah adalah tolak ukur bagi pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Penyajian Laporan keuangan bertujuan Mengungkapkan posisi keuangan selama periode tertentu pada satuan kerja perangkat daerah, informasi keuangan ini dapat di gunakan untuk dibandingkan dengan laporan pada periode sebelumnya atau dengan entitas lainnya, dan juga bisa membantu pengguna dalam mengambil keputusan oleh sebab itu penyajian laporan keuangan harus di buat sebaik baik mungkin sehingga dapat bersifat akuntabel dan transparan. Dalam penyajian laporan keuangan pemerintah mengacu pada PSAP 71 Tahun 2010 tentang Standar akuntansi Pemerintahan berbasis akrual, dengan adanya kebijakan kebijakan yang dapat mempengaruhi baik nya suatu laporan keuangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penyajian laporan keuangan pemerintah daerah sesuai PSAP 71. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode Analisis deskriptif. Metode pengumpulan data dari Hasil wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Penyajian Laporan keuangan yang di buat telah sesuai dan mengacu pada PSAP 71.

Kata Kunci: Evaluasi, Penyajian, Laporan Keuangan, Standar Akuntansi Pemerintahan.

Abstract: Government Financial Statements are a benchmark for the government in carrying out its duties and responsibilities. Presentation of financial statements aims to reveal the financial position for a certain period in the work unit of the regional apparatus, this financial information can be used to compare reports in previous periods or with other entities, and can also assist users in making decisions, therefore the presentation of financial statements must be carried out make it as good as possible so that it can be accountable and transparent. In presenting the government's financial statements, it refers to PSAP 71 of 2010 concerning Accrual-based Government Accounting Standards, with the existence of policies that can affect the good of a financial report. The purpose of this research is to evaluate the presentation of local government financial reports according to PSAP 71. This type of research is qualitative with descriptive analysis method. Methods of data collection from the results of interviews and documentation. The results of this study indicate that the presentation of financial statements made is appropriate and refers to PSAP 71.

Keywords: Evaluation, Presentation, Financial Statements, Government Accounting Standards.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam waktu yang relatif singkat akuntansi sektor publik telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Saat ini terdapat perhatian yang lebih besar terhadap praktik akuntansi yang dilakukan oleh lembaga lembaga pemerintah, perusahaan milik negara/daerah, dan berbagai organisasi publik lainnya. Dengan adanya perhatian lebih dari pemerintah terhadap penilaian manajemen pemerintahan yang menuntut agar sistem

akuntansi manajemen, pemerintahan dan keuangan diperbaiki dan di periksa melalui kebijakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam hal ini Standar Akuntansi Pemerintahan.

Akuntansi pemerintahan adalah aktivitas jasa yang terdiri dari pencatatan, pengklasifikasian dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak eksternal yang terdiri dari Dewan perwakilan rakyat daerah, badan pengawas keuangan, investor, donator.

Penyajian Laporan keuangan di atur dalam PSAP No.1 berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 dengan tujuan mengatur penyajian laporan keuangan untuk pencapaian bersama yakni menjadikan laporan keuangan yang universal sebagai Upaya untuk meningkatkan perbandingan antara laporan keuangan baik terhadap anggaran antar periode maupun antar entitas, Laporan keuangan disajikan dengan menerapkan Basis akrual.

Laporan keuangan adalah bentuk transparansi dan pertanggungjawaban pengelola keuangan negara dan daerah mengenai posisi keuangan yang relevan selama satu periode pelaporan, Tujuan laporan keuangan adalah untuk meningkatkan keterbandingan laporan keuangan, baik terhadap anggaran antarperiode maupun antar entitas. Untuk mencapai tersebut kebijakan akuntansi ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, Laporan keuangan di sajikan sekurang kurangnya sekali dalam setahun, dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih Panjang atau lebih pendek dari satu tahun. Kegunaan laporan keuangan berkang bilamana tidak di sajikan sekurang kurangnya 1 tahun setelah tanggal pelaporan. Adapun karakteristik agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu Relevan dimana informasi yang termuat di dalamnya dapat berpengaruh terhadap keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi masa lalu dan masa kini, Andal yaitu informasi laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, Dapat dibandingkan yaitu informasi yang termuat dapat di bandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Laporan keuangan di susun dengan menerapkan basis akrual.

Badan Pendapatan Daerah merupakan entitas akuntansi yaitu selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan untuk digabungkan dengan entitas pelaporan. Laporan keuangan yang di sajikan dalam entitas akuntansi adalah Laporan realisasi anggaran, Neraca, Laporan Oprasional, Laporan perubahan ekuitas, dan Catatan atas laporan keuangan. Sedangkan untuk entitas pelaporan, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan telah menjadi tonggak perubahan akuntansi yang sebelumnya berbasis kas, kemudian menjadi kas menuju akrual, sampai akhirnya menerapkan basis akrual penuh. Pada praktiknya di lapangan, tidak sedikit pemerintah daerah yang menyusun kebijakan akuntansinya dengan cara menyalin dan menempel pada Standar Akuntansi Pemerintahan sehingga Kebijakannya menjadi terlalu tebal. Sedangkan untuk permasalahan lain ada pada ketidaksesuaian penyajian laporan keuangan dengan peraturan pemerintah yang ada seperti pos pos atau item item dalam laporan keuangan tidak berpedoman pada PSAP 71 tahun 2010, oleh karena itu di harapkan penyajian laporan keuangan pada instansi pemerintah di harapkan berbasis akuntansi yang baik dan benar sesuai PSAP 71.

Penelitian yang dilakukan oleh Alva O (2022) mengenai Penyajian Laporan Keuangan Daerah pada dinas pekerjaan umum dan penata ruang kota manado sudah dianggap telah sesuai dengan pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Yang berlaku. Penelitian yang dilakukan oleh Liswiyan (2018) mengenai Evaluasi penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) Kabupaten Jombang dengan menerapkan akuntansi berbasis akrual tentunya tidak mudah namun seiring berjalannya waktu badan pengelolaan keuangan dan asset daerah mampu menerapkannya dengan baik.

Berdasarkan dengan berbagai hal yang sudah dijabarkan diatas maka penulis tertarik untuk meninjau Kembali lebih dalam terkait penyajian laporan keuangan pada instansi pemerintah sehingga penulis mengambil judul “Evaluasi penyajian Laporan Keuangan daerah sesuai PSAP 71 tentang Standar akuntansi pemerintahan di Badan pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyajian laporan keuangan pada badan pendapatan daerah sesuai PSAP 71.

Pengertian Akuntansi

Akuntansi adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi dan mengklasifikasikan, mencatat transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan atau laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Sumarsan, 2017:1). Menurut financial accounting standards board (2017) mendefinisikan akuntansi sebagai kegiatan jasa yang berfungsi menyediakan suatu informasi kuantitatif yang kemudian digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi.

Akuntansi Pemerintah

Akuntansi Pemerintahan adalah akuntansi yang bersangkutan dengan bidang keuangan negara, dari anggaran sampai dengan pelaksanaan dan pelaporannya termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya (Wiratna Sujarwani/2022).

Sedangkan menurut Abdul Halim (2016) pengertian akuntansi pemerintahan adalah proses pengidentifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi keuangan dari entitas pemerintahan yang dijadikan informasi dalam ranta pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal pemerintah yang memerlukan.

Standar Akuntansi Pemerintah

“Standar akuntansi pemerintah merupakan pedoman penyajian laporan keuangan. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban dalam menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap pengelolaan keuangan”. (Putri Sri Pujanira, 2017).

PSAP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Penyajian laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 diatur kedalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 1 yang bertujuan untuk meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas.

Standar akuntansi pemerintahan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan. Dengan demikian, Standar akuntansi pemerintahan merupakan pernyataan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Standar akuntansi pemerintahan ditetapkan dengan peraturan pemerintah no.71 tahun 2010 sebagai pengganti peraturan pemerintah no.24 tahun 2005. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP), dilengkapi dengan pengantar Stadar Akuntansi Pemerintah dan disusun mengacu pada kerangka konseptual Akuntansi Pemerintahan. (PP No. 71 tahun 2010).

Penyajian Laporan Keuangan sesuai dengan PSAP 71

Laporan keuangan pemerintahan memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui posisi dan kinerja keuangan suatu entitas dapat dilihat dalam laporan keuangannya untuk satu periode atau pada saat tertentu. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Adapun jenis-jenis laporan keuangan pemerintah sesuai PSAP 71 sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Penyajian pendapatan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagian atas sebelum belanja kemudian dilanjutkan dengan Penyajian belanja dengan urutan mengacu pada bagan standar yang berlaku pada pemerintah daerah. Berikut contoh bagan untuk laporan Realisasi anggaran berdasarkan Psap 71.

2. Laporan Operasional

Laporan Operasional merupakan laporan keuangan yang menyedakan informasi mengenai seluruh kegiatan keuangan entitas pelaporan, laporan operasional memberikan informasi tentang kegiatan operasional yang tercermin pada pendapatan, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan.

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas yakni laporan yang menyajikan kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan unsur tahun sebelumnya yang tercermin pada ekuitas awal, surplus/defisit

laporan oprasional, koreksi koreksi yang mengurangi atau menambah ekuitas dan saldo ekuitas akhir di suatu entitas pelaporan.

Penyajian laporan perubahan ekuitas sebaiknya di sajikan sekali dalam setahun, kecuali di tentukan lain oleh peraturan perundang undangan. Berikut penyajian laporan perubahan ekuitas menurut Standar akuntansi Pemerintah daerah.

4. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Pemerintah daerah mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajiban menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Penyajian Neraca sebaiknya disajikan sekali dalam setahun. Adapun pos pos yang disajikan di Neraca

- a. Kas dan setara kas
- b. Investasi jangka pendek
- c. Piutang pajak dan bukan pajak
- d. Persediaan
- e. Investasi jangka Panjang
- f. Asset tetap
- g. Kewajiban
- h. Ekuitas

Pos pos selain yang disebutkan di atas disajikan dalam neraca jika ada kebijakan akuntansi pemerintahan mensyaratkan atau jika penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas akuntansi atau entitas pelaporan. Berikut contoh penyajian Neraca menurut Standar akuntansi pemerintahan Daerah.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan yaitu laporan yang menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan reaisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas. catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam standar akuntansi pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang perlu dilakukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Kajian Penelitian Terdahulu

Sayidah (2021) Melakukan penelitian pada Kabupaten Sopeng dengan menganalisis Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan PP 71 tahun 2010 dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng Hanya Melaporkan 5 laporan keuangan Dan tidak menyajikan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Arus Kas Karna untuk Saldo anggaran lebih Laporan arus kas disajikan oleh bendahara Umum Daerah.

Purnamasari (2020) melakukan penelitian terkait dengan Evaluasi Penyajian Laporan keuangan daerah Berbasis Akrual dan menunjukkan hasil bahwa kantor BPKAD kota Luwu hanya mengalami kesulitan penerapan PP 71 2010 di awal penerapan saja setelah seiring namun dengan waktu sudah tidakmada kendala dalam penerapan PP tersebut terkait Penyajian Laporan keuangan.

Yunita kurnia (2018) melakukan Analisis penerapan basic akrual atas standar akuntansi pemerintah no 71 dan dampaknya pada penyajian laporan keuangan SKPD kecamatan ciputat timur, Tangerang Selatan dalam hal ini penerapan akuntansi berbasic akrual belum sepenuhnya diterapkan sehingga berpengaruh juga pada penyajian laporan keuangannya.

Putra (2021) Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Daerah kota bengkulu sudah berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan namun harus meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber daya aparatur pengelola anggaran dalam setiap organisasi perangkat daerah.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini, analisis deskriptif digunakan untuk mengevaluasi proses pelaksanaan laporan keuangan pemerintah pada Badan

Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan meyesuaikannya dengan Standar Akuntansi pemerintah yang berlaku yaitu PSAP 71.

Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 jenis data yaitu data kualitatif berupa informasi seputar latar belakang, visi misi serta data data lainnya yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan Ibu Magdalena J Rombang SE, ME selaku KASUBAG Perencanaan dan Keuangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang diperoleh langsung dari tempat penelitian. Data tersebut berupa hasil wawancara peneliti dengan bidang keuangan untuk Laporan Keuangan dan bidang Hukum dan kepegawaian untuk data yang menyangkut kepegawaian di Bapenda. Serta data yang dibutuhkan dalam proses penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. wawancara dan dokumentasi data yang bersangkutan.

Metode dan proses Analisis

Metode Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data deskriptif. Metode Deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis dan menggambarkan hasil atau data yang diperoleh sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Dalam hal ini, peneliti melakukan proses analisis data dengan cara:

1. Pengumpulan Data, peneliti mengumpulkan data data berupa Laporan keuangan Badan pendapatan daerah selama periode tertentu
2. Mengolah data, peneliti melihat kembali data yang diperoleh dengan memilah data yang diperlukan dan tidak untuk dijadikan ringkasan yang lebih mudah dipahami sehingga peneliti mudah melakukan evaluasi pada perbandingan selanjutnya.
3. Evaluasi data, peneliti mengevaluasi data yang diperoleh seperti laporan keuangan Bapenda pada periode 2022 lalu diseuaikan dengan Standar Akuntansi pemerintahan yang berlaku yaitu PSAP 71.
4. Menarik kesimpulan dari hasil evaluasi data yang diperoleh dan memberikan saran terkait hasil penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penyajian Laporan Realisasi anggaran Pada Badan pendapatan Daerah

Laporan Realisasi Anggaran disajikan dengan klasifikasi pendapatan LRA menurut jenis pendapatan dan klasifikasi belanja menurut jenis belanja (klasifikasi ekonomi). Sedangkan klasifikasi belanja menurut organisasi dan fungsi disajikan dalam catatan atas laporan keuangan pada bagian lampiran penjelasan pos pos Laporan keuangan.

Dalam penyajiannya pendapatan LRA dan belanja secara konsisten dilaksanakan atas dasar kas (cash basic) dimana pendapatan di akui sesuai dengan hak yang diterima untuk tahun yang bersangkutan, sedangkan belanja di akui sesuai dengan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan untuk tahun yang bersangkutan

1. Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran, Pendapatan diakui pada saat diterima pada rekening kas Umum Daerah atau oleh entitas Pelaporan. Pendapatan yang diterima oleh bendahara penerima di Satuan Kerja Perangkat Daerah yang belum disetorkan ke kas daerah pada akhir tahun buku diakui sebagai ekuitas.
2. Belanja, Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggung jawaban atas pengeluaran tersebut di sahkan oleh unit yang mempunyai fungsi bendahara.
3. Sisa lebih/ kurang pembiayaan Anggaran (SilPA/SiKPA) Sisa Lebih kurang pembiayaan dicatat sebesar selisih lebih kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.

Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2022 dan 2021

KODE AKUN.	URAIAN	REF	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
4	PENDAPATAN – LRA	5.2.1	1.202.529.676.443,00	1.226.436.067.307,00	101,99	1.091.056.472.203,50
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH-LRA	5.2.1.1	1.202.529.676.443,00	1.226.436.067.307,00	101,99	1.091.056.472.203,50
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah- LRA	5.2.1.1a	1.189.889.331.643,00	1.214.292.047.871,00	102,05	1.075.924.577.041,00
4.1.2		5.2.1.1b	48.000.000,00	39.500.000,00	82,29	19.000.000,00

	Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	5.2.1.1d	12.592.344.800,00	12.104.519.436,00	96,13	15.112.895.162,50
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LRA	5.2.1.1d	12.592.344.800,00	12.104.519.436,00	96,13	15.112.895.162,50
5	BELANJA	5.2.2	79.332.850.433,00	74.502.156.324,00	93,91	77.151.146.841,00
5.1	BELANJA OPERASI	5.2.2.1	77.414.492.824,00	72.633.061.892,00	93,82	72.247.703.941,00
5.1.1	Belanja Pegawai	5.2.2.1a	58.120.748.426,00	55.403.649.474,00	95,33	50.188.040.412,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.2.2.1b	19.293.744.398,00	17.229.412.418,00	89,30	22.059.663.529,00
5.2	BELANJA MODAL	5.2.2.2	1.918.357.609,00	1.869.094.432,00	97,43	4.903.442.900,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.2.2.2b	1.518.357.609,00	1.472.132.100,00	96,96	2.967.985.500,00
5.2.3	Belanja Modal Bangunan dan Gedung	5.2.2.2c	400.000.000,00	396.962.332,00	99,24	1.935.457.400,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.2.2.2d	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)		1.123.196.826.010,00	1.151.933.910.983,00	102,56	1.013.905.325.362,50

Sumber: Laporan Keuangan Bapenda 2022.

Penyajian Laporan Perubahan Ekuitas Pada Badan Pendapatan Daerah

Laporan Perubahan ekuitas menyajikan sekurang kuranya pos-pos

- Ekuitas Awal
- Surplus/defisit-LO Pada periode bersangkutan
- Koreksi koreksi yang berlangsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasarkan,
- Ekuitas Akhir

Disamping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam laporan perubahan ekuitas dalam catatan atas laporan keuangan,

Laporan Perubahan Ekuitas

URAIAN	2022	2021
Ekuitas awal	134.228.939.409,15	161.532.500.865,65
Surplus/defisit – lo	1.146.808.111.877,00	985.637.608.628,00
Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar:		
Koreksi ekuitas	(734.849.819,00)	964.155.278,00
Kewajiban untuk dikonsolidasikan	(1.151.933.910.983,00)	(1.013.905.325.362,50)
Ekuitas akhir	128.368.290.484,15	134.228.939.409,15

Sumber: Laporan keuangan Bapenda 2022

Penyajian Neraca pada Badan Pendapatan daerah

Penyajian Neraca menggambarkan posisi keuangan Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2022.

Neraca Per 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN	REF	31 Desember 2022	31 Desember 2021
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Kas Daerah		0,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
Kas di BLUD		0,00	0,00
Kas Lainnya		0,00	0,00
Setara Kas		0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek		0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah		65.795.683.782,00	69.519.855.945,00
Piutang Retribusi Daerah		0,00	0,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah		9.890.440.795,00	10.172.344.735,00
Penyiihan Piutang		(46.714.370.859,00)	(43.815.619.962,00)
Beban Dibayar Dimuka		0,00	0,00
Persediaan		694.333.610,00	946.281.493,00
JUMLAH ASET LANCAR		29.666.087.328,00	36.822.862.211,00

INVESTASI JANGKA PANJANG**Investasi Jangka Panjang Non Permanen**

Investasi Jangka Panjang Kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG NON PERMANEN	0,00	0,00

Investasi Jangka Panjang Permanen

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00

Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen**JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG****ASET TETAP**

Tanah	9.903.800.000,00	9.903.800.000,00
Peralatan dan Mesin	45.879.038.472,00	44.781.722.941,00
Gedung dan Bangunan	34.979.682.723,00	34.582.720.391,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	945.742.970,00	945.742.970,00
Aset Tetap Lainnya	359.356.000,00	359.356.000,00
Konstruksi dalam Penggerjaan	417.505.257,45	417.505.257,45
Akumulasi Penyusutan	(45.817.180.863,00)	(42.076.641.742,00)
JUMLAH ASET TETAP	46.667.944.559,45	48.914.205.817,45

DANA CADANGAN

Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00

Sumber: Laporan keuangan Bapenda 2022

Neraca Per 31 Desember 2022 dan 2021 (Lanjutan)

URAIAN	REF	31 Desember 2022	31 Desember 2021
ASET LAINNYA			
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		300.251.979,15	300.251.979,15
Aset Tidak Berwujud		141.900.000,00	141.900.000,00
Aset Lain-lain		54.185.730.776,00	54.562.924.026,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		(141.900.000,00)	(99.916.667,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		0,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA		54.485.982.755,15	54.905.159.338,15
JUMLAH ASET		130.820.014.642,60	140.642.227.366,60
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		0,00	0,00
Utang Bunga		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka		0,00	0,00
Utang Belanja		2.427.415.208,00	6.388.979.007,00
Utang Jangka Pendek Lainnya		24.308.950,45	24.308.950,45
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		2.451.724.158,45	6.413.287.957,45
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Dalam Negeri		0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		2.451.724.158,45	6.413.287.957,45
EKUITAS			
EKUITAS		128.368.290.484,15	134.228.939.409,15
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		130.820.014.642,60	140.642.227.366,60

Sumber: Laporan Keuangan Bapenda 2022

Penyajian Neraca pada Badan pendapatan telah dilakukan sesuai PSAP 71 Tahun 2010, dalam penyajian laporan keuangan di Badan pendapatan Aset, Kewajiban, Ekuitas di akui dan di catat pada saat terjadinya transaksi tanpa melihat setara kas diterima atau dibayarkan.

Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Badan pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2022 Disusun mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP 71 tahun 2010. Namun demikian dalam penyajiannya berdasarkan Permendagri nomo 13 tahun 2006. Hal ini bertujuan agar pihak yang

berkepentingan dapat memahami terutama dalam Rangka membandingkan antara Realisasi dengan anggaran yang di tetapkan berdasarkan perda APBD/ Perubahan APBD.

Basis yang digunakan dalam penyajian dalam hal ini pecatatan Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Adalah basis kas untuk pendapatan LRA, Belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Sedangkan basis Akrual untuk pengakuan Pendapatan LO, Beban dalam Laporan oprasional Serta asset, kewajiban, dan ekuitas pada Neraca.

Laporan Keuangan SKPD Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Oprasional, Laporan Oprasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Badan Pendapatan tidak membuat Laporan Arus Kas dan Laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih, di kerenaan untuk laporan tersebut dilaporkan langsung oleh Pemerintah Daerah. Mengingat Badan pendapatan Daerah selaku Satuan kerja perangkat daerah, Untuk laporan yang mereka buat disusun berdasarkan pengendalian intern yang memadai, isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pembahasan

Penyajian Laporan Keuangan pada Badan Pendapatan Daerah sesuai PSAP 71

Penyajian Laporan keuangan pada badan pendapatan daerah ini terdiri atas laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Oprasional, laporan perubahan ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan ini di sertai lampiran lampiran berbentuk daftar sebagai refrensi terhadap pos pos laporan keuangan utama maupun catatan atas laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan ini di susun secara double entries atas seluruh pendapatan LRA, pendapatan LO/ Penerimaan dan Belanja, beban/ pengeluaran yang terjadi dalam satu tahun anggaran. Terkait dengan adanya Pernyataan Standar Akuntansi pemerintahan mengenai entitas akuntansi dan entitas pelaporan, sehingga badan pendapatan daerah termasuk dalam entitas akuntansi, karena Badan pendapatan merupakan satuan kerja perangkat daerah yaitu selaku pengguna anggaran oleh karna itu Badan pendapatan hanya melaporkan 5 laporan keuangan tersebut.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, penyajian Laporan keuangan berbasis akrual pada SKPD Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Oprasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan tahun anggaran 2022. Berdasarkan informasi yang saya dapat terkait dengan adanya entitas pelaporan dan entitas akuntansi maka Badan Pendapatan daerah tidak membuat Laporan Arus Kas dan Laporan perubahan saldo anggaran Lebih karena Badan Pendapatan merupakan Satuan kerja Perangkat daerah yang artinya selaku entitas Akuntansi, sehingga Laporan tersebut di susun langsung oleh pemerintah Provinsi daerah yang merupakan entitas pelaporan.

Perbandingan penyajian laporan keuangan pada Pendapatan dengan Standar akuntansi Pemerintahan (PSAP 71)

No	Komponen	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.	PSAP 71	Keterangan
1	Tujuan	Menyajikan informasi laporan keuangan yang relevan bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan mengambil keputusan dengan membandingkan laporan keuangan antar periode maupun antar entitas.	Mengatur Penyajian Laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan Baik terhadap anggaran antar periode maupun antar entitas.	Sudah Sesuai
2	Laporan keuangan	1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Laporan Perubahan Saldo 3. Laporan Oprasional 4. Neraca 5. Catatan Atas Laporan Keuangan	1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Laporan Perubahan Saldo 3. anggaran lebih 4. Laporan perubahan Ekuitas 5. Laporan Arus Kas 6. Laporan Oprasional 7. Neraca 8. Catatan Atas Laporan Keuangan	Sudah Sesuai, terkait adanya entitas pelaporan dan entitas akuntansi

3.	Laporan Realisasi Anggaran	Menyajikan informasi realisasi pendapatan belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, lalu di perbandingkan dengan anggaran dalam satu periode.	Menyajikan informasi realisasi pendapatan belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, lalu di perbandingkan dengan anggaran dalam satu periode.	Sudah sesuai,
4.	Laporan Oprasional	Menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan Oprasional Keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam Pendapatan, beban, surplus pada periode tertentu	Menyediakan informasi Laporan Oprasional Badan pendapatan Selama periode 2020 lalu di sandingkan dengan pelaporan sebelumnya.	Sudah sesuai
5.	Laporan Arus kas	Diklasifikasikan Berdasarkan aktivitas Oprasional. Pembiayaan dan non Anggaran	-	Tidak membuat laporan arus kas
6.	Laporan perubahan Ekuitas	Menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang di anut.	Merupakan laporan penghubung antara laporan oprasional dengan neraca yang menggambarkan kenaikan atau penurunan ekuitas atas Aktivitas oprasional pada tahun pelaporan	Sudah sesuai
7.	Neraca	Menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah selama satu periode	Menggambarkan posisi keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi utara per tnggal 31 Desember 2022	Sudah sesuai
8.	Laporan Perubahan Saldo	Basis Akrual	-	Tidak membuat laporan perubahan saldo
9.	Catatan atas laporan keuangan	Meliputi daftar terperinci atas hasil analisis atas suatu pos dalam LRA, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan oprasional.	Meliputi daftar terperinci atas hasil analisis atas suatu pos dalam LRA, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan oprasional.	Telah sesuai

Sumber: Data Diolah, 2023

Tujuan dalam penyajian laporan keuangan sudah sesuai dengan PSAP yang berlaku yaitu PSAP 71, karena memiliki focus objektif yang sama. Terkait komponen Badan Pendapatan sudah melakukan penyajian sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, Untuk laporan arus kas dan Perubahan Saldo awal merupakan tanggung jawab langsung pemerintah daerah yang bersifat pembendaharaan. Sehingga Badan Pendapatan Daerah tidak membuat laporan tersebut karena Badan Pendapatan selaku Satuan kerja perangkat daerah.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Analisis dapat disimpulkan bahwa Dalam Penyajian laporan Keuangan daerah Tahun anggaran 2022 Realisasi penerimaan pendapatan daerah telah tercapai dan Badan Pendapatan Daerah telah melakukan penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana di atur dalam PSAP 71 meskipun ada beberapa pos pos Laporan keuangan yang penyajiannya masih berbasis Kas sehingga untuk pendapatan LRA masih berbasis kas dalam hal ini pecatatan dan pengakuannya akan di akui apabila sudah terjadi kas di terima atau kas kelua sehingga berpengaruh pada penyajiannya. Dalam Penyajian Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah menggunakan tenaga konsultan dan pendampingan dari Badan Pengawasan keuangan dan pembangunan, yang telah menyediakan Sistem informasi Manajemen daerah (SIMDA) untuk dipakai Badan Pendapatan. Hal ini agar dapat mempermudah Pegawai dalam menjalankan dan mengoprasikan system Akuntansi Pemerintah Daerah untuk Menyajikan Laporan Keuangan. Meskipun awalnya tidak semua pegawai dapat megaplikasikan nya namun pemerintah terus melakukan inovasi

dengan adanya pembaharuan fitur agar lebih dipermudah lagi dalam penggerjaan atau pembuatan laporan keuangan.

Saran

Berdasarkan Kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran yang mungkin bermanfaat bagi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara di masa yang akan datang, sebagai berikut.

1. Sumber daya manusia yang masih belum memadai sehingga masih harus dilakukan pelatihan pelatihan di bidang program keuangan agar penggunaan sistem informasi dapat merata pada seluruh pegawai
2. Baiknya pada tahun anggaran berikut kinerja Badan Pendapatan dapat lebih baik lagi dengan melakukan berbagai Upaya untuk menjamin terpeliharanya kondisi yang mantap, aman, kondusif sehingga tuntutan masyarakat dapat terpenuhi yaitu transparasi dan akuntabilitas.
3. Lebih di tingkatkan lagi kemampuan individual dalam Menyusun laporan keuangan yang andal agar dapat menjadi acuan bagi pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

Halim, A (2016) *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta, Salemba Empat.

Kurnia, Y (2018) " Analisis penerapan basic akrual atas standar akuntansi pemerintah no 71 dan dampaknya pada penyajian laporan keuangan SKPD kecamatan ciputat timur, Tangerang Selatan. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*. <http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/JABI/article/view/1270>. Diakses pada 21 Februari 2023.

Liswiyani (2018) Evaluasi penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) Kabupaten Jombang. Repotori Perbanas <http://eprints.perbanas.ac.id/4109/> Diakses Pada 15 Maret 2023

Mardiasmo (2021), *Kebijakan Akuntansi Pemerintahan daerah*. Bandung

Mahmudi (2016) " *Analisis Laporan Keuangan pemerintah daerah Yogyakarta UPP STIM YKPN*.

Mulyadi (2016) " *Sistem Informasi Akuntansi*" Jakarta.Salemba empat.

Oktavianus, A (2022). Evaluasi penyajian laporan keuangan daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan di Dinas pekerjaan umum dan penata ruang kota manado. *Jurnal LPPM EkoSosBudKum*. Vol 5 no 2 <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lppmekosbudkum/article/view/37934>. Diakses pada 16 mei 2023.

Putra, A (2021) Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dalam Menyusun Laporan Keuangan Daerah kota Bengkulu. *Jurnal terapan pemerintah Minangkabau* Vol 1 no 2 Juli. <https://ejournal.ipdn.ac.id/jtpm/article/view/2071> Diakses pada 28 Maret 2023.

Pujanira, P (2017) Pengaruh Kompetensi Sumberdaya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan penerapan Akuntansi Keuangan Pemerintah daerah Provinsi Yogyakarta. *Jurnal Nominal*. Vol 6 no 02. <https://journal.uny.ac.id/index.php/nominal/article/view/16643> Diakses Pada 25 mei 2023.

Peraturan Pemeritah Nomor 71 tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Purnamasari (2020), Evaluasi penyajian laporan keuangan daerah berbasis akrual pada BPKAD Kabupaten luwu. *Jurnal Akuntansi*. Vol 6 no 2. <https://journal.stiem.ac.id/index.php/jurakun/article/view/557> Diakses Pada 6 juni 2023.

Sayidah, S (2021), Analisis penyajian Laporan Keuangan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan kabupaten soppeng. *SKRIPSI*. Univrtitas Bosow. Makasan

Sugiyono (2016) *Metode penelitian kuantitatif dan R & D*. Bandung

Sumarsan (2018). *Akuntansi dasar dan Aplikasi dalam Bisnis versi IFRS*. Jakarta.

Wiratna, S (2022) *Akuntansi Sektor Publik, Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Yogyakarta.

